



Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana dalam Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Zati Himmatil Aliyah¹, Mujahidin²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : zatihimmatil10@gmail.com¹, mujahidin@ipdn.ac.id²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Disaster-Resilient Village Program (Destana) in enhancing community preparedness against flood disasters in Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Tanggulangin is among the most flood-prone districts in Sidoarjo, with 18 villages at high risk and recurring annual flooding that displaces thousands of households. This research employs a qualitative descriptive method with a purposive and snowball sampling technique, gathering data through in-depth interviews, observations, and documentation. Effectiveness is measured using five indicators proposed by Sutrisno (2010): program comprehension, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. The results indicate that Destana has been sufficiently effective in improving community preparedness through systematic socialization, practical simulations, and community-based coordination. Key achievements include increased disaster knowledge and attitude change, more organized evacuation mechanisms, stronger inter-party coordination, and notable behavioral shifts such as active environmental maintenance and emergency preparedness. However, limitations remain in early warning systems, participation of vulnerable groups, geographic coverage, and absence of formal village regulations on disaster risk reduction. The study recommends formalizing local regulations, expanding program coverage, strengthening early warning technology, and integrating community empowerment with physical infrastructure improvements.

Keywords: Disaster Resilient Village, Flood Preparedness, Program Effectiveness, Community Empowerment, Tanggulangin.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Tanggulangin merupakan wilayah dengan intensitas banjir tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, dengan 18 desa berisiko tinggi dan kejadian banjir berulang setiap tahun yang berdampak pada ribuan kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive dan snowball, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Efektivitas diukur menggunakan lima indikator menurut Sutrisno (2010): pemahaman program, ketepatan sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Destana cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi sistematis, simulasi praktis, dan koordinasi berbasis komunitas. Capaian utama meliputi peningkatan pengetahuan

kebencanaan, perubahan sikap masyarakat, mekanisme evakuasi yang lebih terorganisir, koordinasi antarwarga yang lebih solid, serta perubahan perilaku nyata seperti pemeliharaan lingkungan aktif dan persiapan tas siaga bencana. Namun, masih terdapat keterbatasan pada sistem peringatan dini, keterlibatan kelompok rentan, cakupan wilayah, dan belum adanya formalisasi regulasi desa tentang pengurangan risiko bencana. Penelitian merekomendasikan formalisasi peraturan desa, perluasan cakupan program, penguatan teknologi peringatan dini, dan sinergi antara pemberdayaan masyarakat dengan penanganan infrastruktur fisik.

Kata Kunci: Desa Tangguh Bencana, Kesiapsiagaan Banjir, Efektivitas Program, Pemberdayaan Masyarakat, Tanggulangin.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, serta dikelilingi oleh lempeng tektonik aktif, sehingga masuk dalam kawasan *Ring of Fire*. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam, di mana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.518 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 6 Oktober 2025, dengan banjir mendominasi sebanyak 1.266 kejadian yang menyebabkan 356 orang meninggal dunia, 39 orang hilang, 4,93 juta orang terdampak dan mengungsi, serta 594 orang mengalami luka-luka (DataIndonesia.id, 2025). Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan 237 kejadian bencana per Oktober 2025. Di antara kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap banjir, dengan total 71.252 Ha wilayah termasuk dalam kategori bahaya tinggi. Kondisi ini diperparah oleh posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang diapit oleh dua aliran sungai besar yaitu Kali Surabaya di utara dan Kali Porong di selatan, serta penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat dampak semburan lumpur Lapindo sejak tahun 2006. Kecamatan Tanggulangin menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data laporan kejadian banjir tahun 2019 hingga 2024, Kecamatan Tanggulangin konsisten mencatat jumlah kejadian tertinggi. Hampir setiap musim hujan, sejumlah desa mengalami genangan dengan ketinggian 60 hingga 70 sentimeter selama dua hingga tujuh hari bahkan lebih, yang mengganggu aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar (Putri et al., 2024; Rahcmawati & Choiriyah, 2024).

Menanggapi persoalan ini, pemerintah mengembangkan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bertujuan membentuk desa dengan kemampuan mandiri menghadapi ancaman bencana. Program ini menekankan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Melalui Destana, masyarakat diberikan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk memahami risiko bencana serta cara mitigasi yang tepat. BPBD Kabupaten Sidoarjo telah membentuk 22 Desa Tangguh Bencana sejak 2017 di tujuh kecamatan, termasuk tiga desa di Kecamatan Tanggulangin, yaitu Desa Kedungbanteng, Banjarasri, dan Penatarsewu.

Meskipun program Destana telah diimplementasikan, fakta menunjukkan bahwa bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin masih terus berulang dengan intensitas yang tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Destana belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih cenderung berorientasi pada aspek administratif daripada substantif berupa peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat (Samsuddin et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Destana dalam kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2023). Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada tiga desa yang telah menerapkan Program Destana, yaitu Desa Kedungbanteng, Desa Banjarasri, dan Desa Penatarsewu.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang mencakup wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan kriteria: terlibat aktif dalam program Destana, memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, serta terdampak langsung oleh bencana banjir. Informan meliputi pejabat BPBD Kabupaten Sidoarjo Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, perangkat Kecamatan Tanggulangin, kepala desa dari ketiga desa Destana, relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan masyarakat desa.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023) yang meliputi empat tahap: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber data.

Efektivitas program diukur menggunakan teori Sutrisno (2010) yang mencakup lima dimensi: (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, dan (5) perubahan nyata. Dimensi-dimensi ini dikombinasikan dengan indikator kesiapsiagaan masyarakat dari kerangka LIPI-UNESCO/ISDR (2006) yang meliputi pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Destana di Kecamatan Tanggulangin telah berjalan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program ini dilaksanakan di Desa Kedungbanteng, Banjarasri, dan Penatarsewu dengan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan kebencanaan, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pemasangan rambu jalur

evakuasi, pembuatan peta jalur evakuasi, dan simulasi bencana. Pengukuran efektivitas program dilakukan berdasarkan lima dimensi Sutrisno (2010) sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Dimensi pertama mencakup sejauh mana program dapat dimengerti, diterima, dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyampaian program dilakukan melalui jalur struktural bertingkat, yakni dari pemerintah provinsi kepada BPBD kabupaten, kemudian diteruskan ke kecamatan, lalu ke desa, dan akhirnya kepada masyarakat. Penyampaian tidak dilakukan secara seragam dan sekali jalan, melainkan disesuaikan dengan karakteristik komunitas masing-masing. Pola penyampaian yang berulang, penggunaan bahasa sederhana, serta kombinasi antara metode ceramah dan simulasi praktis terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat.

Di tingkat desa, keterlibatan berbagai aktor, mulai dari BPBD kabupaten, perangkat kecamatan, pemerintah desa, hingga tokoh masyarakat dan relawan menunjukkan adanya mekanisme difusi informasi yang bertingkat dan saling memperkuat. Dengan demikian, dari sisi indikator pemahaman program, Destana di Kecamatan Tanggulangin dapat dinilai telah berjalan cukup efektif, meskipun perlu upaya berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok yang selama ini kurang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi

2. Ketepatan Sasaran

Dimensi kedua menilai sejauh mana program menjangkau target yang ditetapkan, meliputi ketepatan wilayah, keterlibatan kelompok rentan, dan tingkat motivasi masyarakat. Dari sisi jangkauan wilayah, pemilihan Desa Kedungbanteng, Banjarasri, dan Penatarsewu sebagai lokasi program telah tepat sasaran karena didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sidoarjo 2018-2022 yang menempatkan Kecamatan Tanggulangin pada kelas bahaya banjir tertinggi. Namun, para informan secara konsisten menyoroti bahwa masih banyak desa lain di Kecamatan Tanggulangin yang rentan terhadap banjir namun belum mendapatkan program serupa.

Keterlibatan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas masih bersifat terbatas dan lebih pasif. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip inklusivitas yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Dari sisi motivasi, pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak banjir menjadi faktor pendorong utama partisipasi. Warga yang pernah merasakan kerugian akibat banjir cenderung lebih antusias dan responsif, khususnya terhadap kegiatan simulasi dan pelatihan praktis dibandingkan sosialisasi yang bersifat ceramah.

3. Tepat Waktu

Dimensi ketiga mengukur ketepatan jadwal pelaksanaan program serta kecepatan respons masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir. Pelaksanaan program cenderung bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kesediaan masyarakat, meskipun terkadang terjadi keterlambatan akibat kendala

teknis. Fleksibilitas jadwal dapat dipahami sebagai adaptasi dalam konteks program berbasis komunitas.

Dari sisi respons cepat, perubahan signifikan terlihat pada pola respons masyarakat terhadap ancaman banjir. Masyarakat yang sebelumnya cenderung panik dan tidak terkoordinasi kini telah menunjukkan respons yang lebih terorganisir. Para relawan FPRB bergerak cepat ke titik-titik yang disepakati untuk memantau ketinggian air, menginformasikan kepada warga, dan mempersiapkan jalur evakuasi. Transformasi dari respons yang kacau menuju respons berbasis pembagian tugas yang jelas mencerminkan keberhasilan program dalam membangun kapasitas adaptif masyarakat.

4. Tercapainya Tujuan

Dimensi keempat menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan pada awal program berhasil dicapai. Pertama, terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap yang cukup signifikan. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat banjir kini telah memahami langkah-langkah dasar seperti evakuasi, penyelamatan barang prioritas, dan cara menjaga keselamatan diri dan keluarga. Perubahan sikap terlihat dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk berkurangnya kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Kedua, terkait pedoman atau aturan lokal, ketiga desa telah membangun konsensus lokal tentang prosedur penanganan banjir melalui musyawarah inklusif. Namun, kesepakatan ini belum terdokumentasi dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal dan legal. Ketiga, ketiga desa memiliki peta jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah disosialisasikan dan dipraktikkan melalui simulasi. Rencana evakuasi mencakup pembagian peran relawan, perangkat desa, serta prosedur khusus untuk kelompok rentan.

Keempat, terkait sistem peringatan dini, kondisi yang ada masih sangat sederhana. Ketiga desa masih mengandalkan pengeras suara masjid, grup WhatsApp, dan komunikasi mulut ke mulut. Kondisi ini belum memenuhi amanat Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan pengembangan sistem peringatan dini yang terorganisir. Kelima, koordinasi antarwarga berjalan cukup baik. Pemanfaatan grup WhatsApp memainkan peran vital dalam memastikan seluruh anggota komunitas mendapatkan informasi secara cepat, serta terbangunnya sistem tim peringatan dini dan evakuasi yang melibatkan kepala desa, FPRB, kepala dusun, dan BPBD.

5. Perubahan Nyata

Dimensi kelima menilai perubahan perilaku nyata yang dihasilkan dari program. Perubahan perilaku adaptif yang paling terlihat adalah meningkatnya keaktifan masyarakat dalam kegiatan mitigasi seperti kerja bakti membersihkan saluran air, mulai banyaknya warga yang mempersiapkan tas siaga bencana, serta terbentuknya komunikasi informal antartetangga untuk memantau kondisi lingkungan. Solidaritas sosial dan semangat gotong royong juga meningkat, tercermin dari kebersamaan warga dalam menghadapi dan menangani banjir tanpa harus menunggu instruksi.

Namun dari sisi kondisi wilayah, banjir masih terus terjadi karena penyebab struktural berupa kapasitas drainase yang terbatas, pendangkalan sungai, dan penurunan muka tanah belum tertangani. Program Destana sebagai intervensi *softpower* yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas perlu diintegrasikan dengan program penanganan infrastruktur fisik (*hardpower*) seperti normalisasi sungai dan pembangunan rumah pompa air.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Destana

Beberapa faktor pendukung utama pelaksanaan program Destana di Kecamatan Tanggulangin adalah: (1) pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak banjir yang mendorong motivasi partisipasi tinggi; (2) ketersediaan pendanaan dari berbagai sumber termasuk Dana Desa (APBN), APBD Provinsi, dan sektor swasta. Tabel berikut menyajikan alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana di ketiga desa:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kedungbanteng

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.526.470	DDS
Sub Bidang Keadaan Darurat	22.828.670	DDS
Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000	DDS
TOTAL	67.755.140	

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2025 (diolah Peneliti, 2026)

Tabel 2. Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Banjarasri

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	44.766.848	PBH
Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000	DDS
TOTAL	66.366.848	

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Banjarasri Nomor 05 Tahun 2025 (diolah Peneliti, 2026)

Tabel 3. Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Penatarsewu

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	DDS
Sub Bidang Keadaan Darurat	57.160.000	DDS
Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000	DDS
TOTAL	98.160.000	

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Penatarsewu Nomor 08 Tahun 2025 (diolah Peneliti, 2026)

Ketiga desa telah mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Desa (DDS) yang berasal dari APBN dan Pendapatan Bagi Hasil (PBH) dari pajak dan retribusi daerah. Faktor pendukung lainnya adalah: (3) keterlibatan relawan FPRB yang berdedikasi dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan di komunitas; (4) penerapan metode

pembelajaran praktis berbasis simulasi lapangan yang terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah konvensional; dan (5) jaringan komunikasi berbasis teknologi seperti WhatsApp yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi: (1) keterbatasan sumber daya manusia pendamping di BPBD sehingga intensitas monitoring dan evaluasi menjadi kurang optimal; (2) partisipasi masyarakat yang belum merata, khususnya kelompok rentan; (3) sistem peringatan dini yang masih konvensional dan bergantung pada komunikasi informal; (4) belum adanya formalisasi regulasi lokal dalam bentuk Peraturan Desa tentang pengurangan risiko bencana; (5) cakupan program yang baru menjangkau tiga dari 18 desa di Kecamatan Tanggulangin; dan (6) kondisi fisik infrastruktur wilayah seperti kapasitas drainase terbatas dan penurunan muka tanah yang berada di luar jangkauan intervensi program Destana.

Upaya Mengatasi Kendala Program Destana

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Pertama, keterbatasan SDM diatasi dengan mengoptimalkan peran relawan FPRB sebagai perpanjangan tangan BPBD di tingkat komunitas melalui pelatihan terstruktur. Strategi ini efisien karena sekaligus mengatasi keterbatasan SDM BPBD dan meningkatkan kapasitas teknis komunitas. Kedua, ketidakmerataan partisipasi diatasi melalui pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan nyata, sosialisasi berulang, simulasi langsung, dan pembukaan ruang diskusi dua arah

Ketiga, keterbatasan sistem peringatan dini diatasi dengan mengintegrasikan metode tradisional, yakni pengeras suara masjid, dengan teknologi komunikasi berbasis WhatsApp. Hal ini merupakan langkah awal yang positif meski masih perlu dikembangkan menuju sistem yang lebih terstandarisasi. Keempat, ketiadaan regulasi desa formal didorong melalui pendampingan BPBD dalam penyusunan dokumen rencana evakuasi dan perencanaan kebencanaan desa. Kelima, keterbatasan cakupan program diatasi melalui koordinasi lintas desa yang difasilitasi oleh kecamatan dan advokasi kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan alokasi anggaran. Keenam, kondisi infrastruktur fisik didorong melalui upaya sinergi antara program Destana dengan program penanganan infrastruktur fisik yang melibatkan BPBD, Dinas PU Bina Marga, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Tanggulangin, pemerintah desa dan seluruh relawan FPRB di Desa Kedungbanteng, Banjarasri, dan Penatarsewu atas kesediaan dan keterbukaan dalam memberikan informasi selama penelitian. Terima kasih pula kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Destana di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir berdasarkan lima dimensi efektivitas Sutrisno (2010), meskipun belum optimal secara menyeluruh. Dari dimensi pemahaman program, mekanisme penyampaian yang bertingkat dan partisipatif telah berhasil menjangkau masyarakat melalui sosialisasi berulang, pelatihan, dan simulasi praktis. Dari dimensi ketepatan sasaran, pemilihan desa sudah berbasis kajian risiko yang valid, namun keterlibatan kelompok rentan masih belum optimal. Dari dimensi tepat waktu, masyarakat menunjukkan peningkatan kecepatan dan keteraturan respons dalam menghadapi ancaman banjir.

Dari dimensi tercapainya tujuan, terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap yang signifikan, terbentuknya kesepakatan lokal tentang prosedur evakuasi, serta terbangunnya koordinasi antar pihak yang lebih solid, meskipun sistem peringatan dini masih bersifat konvensional dan regulasi lokal belum terformalkan. Dari dimensi perubahan nyata, masyarakat menunjukkan perubahan perilaku adaptif berupa peningkatan partisipasi dalam kegiatan mitigasi, perubahan kebiasaan pengelolaan lingkungan, dan terbentuknya semangat gotong royong yang lebih kuat. Program ini direkomendasikan untuk memperkuat formalisasi Peraturan Desa tentang pengurangan risiko bencana, memperluas cakupan ke desa-desa rawan yang belum terjangkau, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, serta mengintegrasikan program pemberdayaan komunitas dengan penanganan infrastruktur fisik wilayah secara terpadu.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminudin. (2021). *Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam* (Ed. ke-1). Bandung: Angkasa Group.
- Anggraini, D. (2019). *Penanganan cepat bencana di desa*. Temanggung: Literasi Desa Mandiri.
- Aprilia, B. (2025). *Memahami manajemen bencana di Indonesia* (Ed. ke-1). Sleman: DeePublish.
- Armando, S. S., & Arif, L. (2023). Mitigasi bencana banjir secara terpadu dan kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 267–276. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8263>
- Balqis, G., Rifai, M., & Santoso, M. P. T. (2025). Efektivitas program Destana oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Cililitan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1120–1128.
- BNPB. (2024). *Data informasi bencana Indonesia (DIBI) 2024*. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kabupaten Sidoarjo. (2018). *Dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2018–2022*. Sidoarjo: BPBD.
- BPS Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2025*. Sidoarjo: BPS.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat*. PT Nas Media Indonesia.

- Erwinda, & Firdaus, M. R. (2025). Efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial di Kantor Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *JAPB*, 8(1), 508–520. <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1188>
- Hana Salsabila, & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas program kelurahan tangguh bencana oleh BPBD Kota Padang. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(2), 249–255. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v11i2.2074>
- Kementerian Dalam Negeri RI, & BNPB. (2014). *Panduan penyelenggaraan penanggulangan risiko berbasis komunitas (PRBBK)*. Jakarta: Kemendagri & BNPB.
- Kusumasari, B. (2019). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal* (Ed. ke-1). Klitren: Gava Media.
- LIPI-UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami*. Jakarta: UNESCO Office.
- Permatasari, T. O., & Sinduwiatmo, K. (2024). Meningkatkan tanggap bencana di Indonesia melalui strategi komunikasi yang terintegrasi secara budaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1, 28–41.
- Putri, N. H., Hariyoko, Y., & Murti, I. (2024). Manajemen strategi badan penanggulangan bencana daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(4).
- Rahcmawati, F., & Choiriyah, I. U. (2024). Strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 51–62.
- Rahmadani, Y., Sutanto, Bahar, F., & Wilopo. (2025). Efektivitas program desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang untuk mendukung keamanan nasional. *Ikraith-Humaniora*, 9(2), 687–694. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>
- Ristiani, I. Y., & Supriatna, A. (2023). *Pengantar manajemen kebencanaan*. PT Pustaka Interes Media Amani.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Samsuddin, N. V., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., Pramono, S., & Sunarya, A. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan program desa tangguh bencana dalam perspektif hexahelix assessment di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 636–650.
- Sayuti, R. H., Inderasari, O. P., & Evendi, A. (2021). The influence of education and local culture on community preparedness in facing disasters. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*, 5(1), 1.
- Semeru, G. A. (2024). *Strategi penanggulangan bencana banjir di Desa Mulyasari sebagai desa tangguh bencana* (Skripsi).
- Sriyono, Benardi, A. I., Putro, S., Nurropik, M., & Gerar, Y. J. V. (2024). Peningkatan kapasitas bencana banjir desa tangguh bencana di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(4), 42–50.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. ke-2). Bandung: Alfabeta.

Sukamto. (2015). *Manajemen antisipasi bencana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumardi. (2025). *Pengantar ilmu pemerintahan (konsep, teori, dan aplikasinya)* (Ed. ke-1). Jakarta: Tahta Media Grup.

Sutrisno. (2010). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana.